



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 900/11/SETDA/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT KERJA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB I huruf H angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 22);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. 001/900/BPM/I/2026 tanggal 06 Januari 2026
 2. 900/01/BU/I/2026 tanggal 02 Januari 2026
 3. 005/027/BPBJ/II/2026 tanggal 02 Januari 2026
 4. 180/003/B.HUK/I/2026 tanggal 02 Januari 2026
 5. 900/006/BKS/I/2026 tanggal 05 Januari 2026
 6. 100/002/T.Pem/I/2026 tanggal 02 Januari 2026
 7. 001/Adm.Pemb/I/2026 tanggal 02 Januari 2026
 8. 500/001/B.EKO/I/2026 tanggal 02 Januari 2026
 9. 400/0001/KESRA/I/2026 tanggal 02 Januari 2026
 10. 112/PROKOPIM/I/2026 tanggal 02 Januari 2026
 11. 000.8/005/ORG/I/2026 tanggal 02 Januari 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT KERJA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:

- a. membantu melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing unit kerja;
- b. membantu menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- c. membantu melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. membantu melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD Sekretariat Daerah; dan
- e. membantu menyusun laporan keuangan SKPD Sekretariat Daerah.

~~KETIGA~~ : Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada kode rekening Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (5.1.02.02.01.0080) dengan rincian:

Honorarium PPK Unit Kerja:

- a. Bagian Kerja Sama :Rp770.000,00/1 orang/bulan
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat:Rp1.250.000,00/1 orang/bulan
- c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat :Rp990.000,00/1 orang/bulan
- d. Bagian Protokol :Rp990.000,00/1 orang/bulan
- e. Bagian Umum :Rp2.040.000,00/1 orang/bulan
- f. Bagian Pengadaan Barang/Jasa :Rp770.000,00/1 orang/bulan
- g. Bagian Hukum :Rp880.000,00/1 orang/bulan
- h. Bagian Tata Pemerintahan :Rp660.000,00/1 orang/bulan
- i. Bagian Perekonomian :Rp660.000,00/1 orang/bulan
- j. Bagian Organisasi :Rp660.000,00/1 orang/bulan
- k. Bagian Administrasi Pembangunan :Rp570.000,00/1 orang/bulan

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 900/11/SETDA/TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT
KERJA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	BAGIAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PPK BAGIAN
1	BAGIAN PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Gunat	Nama : YANTJE RANDARISSING, MS. S.,M.AP Nip : 19750125 200312 1 00 8 Pangkat : Pembina Tk. I
2	BAGIAN UMUM		- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peaturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nama : RUGAYAH, SE Nip : 19680412 200701 2 040 Pangkat : Penata Muda Tk. I

			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan kebutuhan rumah Tangga kepala daerah - Penyediaan kebutuhan rumah Tangga Wakil kepala Daerah - Penyediaan kebutuhan rumah Tangga Sekretariat Daerah - Pengamanan Barang Milik Daerah Pada SKPD - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya - Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	
--	--	--	--	--

3	BAGIAN KERJASAMA	PROGRAMA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Nama : MUKRAMIN, S. ST Nip : 19760811 200003 1 007 Pangkat : Penata Muda Tk. I
4	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PROGRAMA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- Penataan Administrasi Pemerintahan - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nama : NUR WARKA, S. IP., M.Si Nip : 19710724 200502 1 001 Pangkat : Pembina Tk. I
5	BAGIAN ORGANISASI	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nama : AKBAR, SE., M. Si Nip : 197306302007011000 Pangkat : Penata Tk. I
6	BAGIAN KESRA	PROGRAMA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Nama : ANDI RESKY NURUL HUDA, S. Sos Nip : 19850404 200901 2 004 Pangkat : Penata
7	BAGIAN HUKUM	PROGRAMA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah - Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum - Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Nama : ARIS LOLANG, SH Nip : 19801223 201506 1 001 Pangkat : Penata
8	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Fasilitas Keprotokolan - Fasilitas Komunikasi Pimpinan - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Nama : SYAMSUL BAKHRI Nip : 19860920 200801 1 002 Pangkat : Penata

9	BAGIAN PEREKONOMIAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Nama : AMIRUDDIN, S.IP.M.Tr.AP Nip : 19770714 200604 1 014 Pangkat : Penata Tk. I
10	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Nama : DIANA RAHMAN, ST Nip : 19861019 201101 2 018 Pangkat : Penata Tk. I
11	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Nama : ACEP ROCHMAT SUNARWAN, SE Nip : 19800728 20150 1 003 Pangkat : Penata Muda Tk. I

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. ZULKIFLY

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Maimina, SH., MH.